
DAFTAR ISI

Mengelola Perbatasan Negara

1. Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia
Iva Rachmawati dan Fauzan 95-109
2. Rezim Persahabatan ASEAN dalam Tata Kelola Lintas Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Berbasis *Connectivity*
Saptopo B Ilkodar 110-124
3. Penguatan *Human Security* sebagai Strategi Pengelolaan Perbatasan Indonesia-Malaysia
Yohanes Sanak 125-135
4. Keamanan Energi dan Hubungan Kerja Sama Cina-Jepang
Uni Wahyuni Sagena, Ravichandran Moorthy 136-152
5. Signifikansi Desentralisasi Kehutanan Bagi Implementasi REDD+ di Kabupaten Maluku Tengah
Emilianus Yakob Sese Tolo 153-168
6. Menuju Demokrasi Rasional:
Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik
Antonius Galih Prasetyo 169-185

Keamanan Energi dan Hubungan Kerja Sama Cina-Jepang

Uni Wahyuni Sagena

Program Studi Strategi dan Keamanan Internasional,
FSSK Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM).
E-mail: unisku@yahoo.com

Ravichandran Moorthy

Program Studi Strategi & Hubungan Antarabangsa,
FSSK Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
E-mail: drravi5774@gmail.com

Abstract:

This article explores the Chinese and Japanese energy relationship by describing changes in the Chinese energy situation as a starting point. The article breaks down that the strength of the Chinese domestic energy since the 1970s and the decade of the 1980s make the country's independent in energy and become the largest oil exporter country, especially to the energy poor neighbor, Japan. However, entering the decade of the 1990s or the end of the post-Cold War era, the situation changed drastically when China faces the energy crisis. The change status bring a wide range of implications for Japan and influence the bilateral energy relations of the two countries, which tend to be ambivalent or ambiguous, between energy cooperation and the potential of conflict. As main purpose of this paper is to identify which energy issues are a direct influence on the behavior of the interaction between China and Japan and as knowledge contribution in understanding the issues of energy itself and the Sino-Japanese relations as a whole. The main assumption of this article is that the energy security factor is a very important issue and significant in shaping the nature and pattern of Sino-Japanese relations, because it raises consideration of national interests and national security of both countries, particularly in the present and the future.

Keywords:

energy security; conflict; cooperation; China; Japan

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi pola hubungan keamanan energi Cina dan Jepang dengan menggambarkan perubahan situasi energi di Cina sebagai titik tolaknya. Artikel ini menguraikan bahwa kekuatan energi domestik Cina sejak dekade 1970-an dan 1980-an membuat negara tersebut mandiri dalam hal energi dan menjadi negara eksportir minyak terbesar bagi negara tetangganya yang miskin energi, Jepang. Keadaan ini menciptakan hubungan interdependensi dalam kerja sama energi antara mereka sehingga terjalin hubungan yang harmonis dalam isu energi. Namun memasuki dekade tahun 1990-an atau pasca berakhirnya era Perang Dingin, keadaan tersebut berubah drastis sebab pelan-pelan Cina banyak bergelut dengan masalah krisis energinya. Perubahan status tersebut menimbulkan implikasi yang luas bagi Jepang sehingga mempengaruhi hubungan energi

bilateral kedua negara yang cenderung bersifat ambivalen atau mendua, antara jalinan kerja sama dan potensi konflik. Adapun tujuan utama penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi isu-isu keamanan energi yang memberi pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku Cina dan Jepang. Artikel ini diharapkan bisa memberi kontribusi keilmuan untuk memahami isu keamanan energi dalam hubungan bilateral Cina-Jepang. Asumsi utama artikel ini adalah bahwa faktor energi merupakan isu yang sangat penting dan cukup signifikan dalam membentuk pola hubungan Cina-Jepang selama ini. Beberapa kasus yang diangkat menunjukkan potensi terjadinya konflik keamanan energi, namun di sisi lain juga tercipta jalur kerja sama energi. Kecenderungan masing-masing potensi tersebut terkait rapat dengan pertimbangan kepentingan nasional dan keamanan nasional kedua negara tersebut, baik pada masa sekarang maupun masa-masa akan datang.

Kata Kunci:

Keamanan energi; konflik; kerja sama; Cina; Jepang

Pendahuluan

Dalam isu keamanan energi, hubungan antara Cina dan Jepang yang ada saat ini merupakan kelanjutan dari perubahan dramatik yang telah berlangsung sebelum dekade tahun 1990-an. Artikel ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai bagaimana perubahan energi di Cina telah memberi pengaruh atau dampak cukup signifikan terhadap hubungan bilateral kedua negara besar di Asia Timur tersebut, khususnya dalam isu keamanan strategis. Isu keamanan energi diangkat karena faktor energi dalam hubungan kedua negara selama ini masih kurang mendapat perhatian atau kurang dianalisis dibandingkan dengan isu-isu tradisional lainnya. Padahal, isu keamanan energi ini kini menjadi isu utama yang mempengaruhi pola hubungan ekonomi-politik, sosial, lingkungan hidup, termasuk keamanan-strategis Cina-Jepang. Isu tersebut ini kini telah menjadi topik penting dalam pembahasan kerja sama kedua negara tersebut, baik secara bilateral, regional, maupun global. Energi utama yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah bahan bakar fosil (*fossil fuel*), terutama minyak dan gas alam, selain sumber-sumber energi lainnya yang juga turut dibahas sepintas.

Artikel ini akan mengeksplorasi pola hubungan keamanan energi kedua negara dari waktu ke waktu. Pembahasan akan diawali terlebih dahulu dengan menjelaskan konsep keamanan energi yang digunakan dalam artikel ini. Bagian kedua mengemukakan situasi keamanan energi di Cina sebelum periode 1990-an dan bagaimana situasi itu mempengaruhi hubungan Cina-Jepang. Bagian ketiga mengemukakan perubahan situasi energi Cina pasca 1990-an dan bagaimana situasi tersebut menunjukkan dua kecenderungan, yaitu menjadi sumber kerja sama energi di satu sisi dan berpotensi menjadi sumber konflik keamanan energi di sisi lain. Bagian terakhir berisi kesimpulan kajian ini. Untuk membahas keseluruhan isu dalam kajian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan kronologis untuk mendeskripsikan konteks dan kerangka kajian.

Konsep Keamanan Energi dan Arti Pentingnya Bagi Negara

Konsep keamanan energi mulai muncul dan mendapat perhatian serius sejak terjadinya peristiwa *oil shock* pada dekade tahun 1970-an yang kemudian digunakan secara lebih luas di luar domain para ahli energi dan militer. Kini, konsep ini juga telah diterima menjadi salah satu konsep

keamanan yang bukan hanya berfungsi sebagai ilmu yang hanya khusus mempelajari isu energi sebagai sumber daya alam (*resources issues*) saja, namun juga dibahas dalam berbagai wacana pengambilan kebijakan pemerintah, politik luar negeri, maupun masyarakat di seluruh dunia. Isu energi masuk ke dalam cakupan studi keamanan (*security studies*) melalui proses yang disebut dengan sekuritisasi isu (*issue securitization*): proses pengidentifikasian isu tertentu, politik maupun non-politik, yang bertujuan untuk menjadikan isu tersebut sebagai agenda atau program keamanan. Karena itu, sekuritisasi bisa juga dilihat sebagai bentuk lain dari politisasi isu (Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, 1998:23). Meski demikian, belum ditemukan satu konsep tunggal yang seragam karena para ahli dan pengamat mendefinisikan konsep keamanan energi ini secara berbeda-beda, sejalan dengan penekanan dimensi yang berbeda juga.

Menurut Michael T. Klare (2008:484), negara konsumen yang sangat bergantung pada impor energi perlu memahami konsep keamanan energi dalam dua hal. Pertama, bagaimana cara mendapatkan persediaan energi yang cukup (*sufficient supplies*) dan kedua, bagaimana tetap menjaga keamanan pengiriman energi tersebut tanpa halangan (*unhindered delivery*) dari negara produsen. Ahli militer Amerika Serikat, Bernard D. Cole (2008:159), juga memasukkan dimensi geografis suatu negara dan mengajukan tiga elemen utama dalam konsep keamanan energi, yaitu ketersediaan energi (*energy availability*), keterjangkauan terhadap hasil energi (*energy affordability*), dan kemampuan militer (*military capability*) untuk menyelamatkan persediaan energi yang diinginkan.

Kekhawatiran terhadap gangguan dan ketidakamanan energi (*energy insecurity*) membuat konsep ini menjadi bagian penting dari isu keamanan nasional negara (*national*

security). Penelitian beberapa pengamat internasional, seperti Kevin Rosner (2010), Phillip E. Cornell (2009), Haider A. Khan (2007), John R. McCaskill (2007), dan Williamson Murray (2002) melihat eratnya hubungan antara energi, keamanan nasional dan kekuatan negara. Menurut mereka, ketiga elemen ini harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan keamanan negara. Oleh karena itu, arti dan nilai penting energi untuk negara dilihat dalam perspektif kekuatan nasional, karena energi sangat mempengaruhi stabilitas negara itu sendiri. McCaskill (2007) menegaskan bahwa:

From a national power perspective, energy is intertwined with economic power, diplomatic power and military power. This entanglement the nexus for National Security Strategy and Energy Policy. The definition of Energy Security is the concept of using a combination of national means to achieve a stable dan reliable energy portofolio.

Jadi, negara dengan isu energi tidak bisa dipisahkan karena energi diperlukan untuk transportasi, militer, maupun ketika terjadi konflik atau perang. Oleh karena itu, tantangan penting bagi seorang pemimpin negara pada masa kini adalah berusaha tetap menjaga keamanan energi di negara yang dipimpinnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Kevin Rosner (2010):

National security leaders now recognize that energy security in all its manifestations, from domestic imperative of the protection of critical energy infrastructure to the integrity of global energy supply chains, to the use of scarce resources for exacting political and economic leverage by producer countries over consuming ones, entails issues far afield of energy as a narrow resource issue. Energy security has become a defining security challenge of the 21st century.

Pentingnya energi bagi keamanan negara tidak dapat disangkal lagi. Hal ini mengingat isu-isu keamanan domestik maupun internasional belakangan ini sering muncul dari masalah keamanan energi, seperti ancaman kelangkaan minyak, harga

minyak dunia yang tinggi, risiko blokade jalur perdagangan minyak dunia, risiko embargo negara produsen minyak, risiko gangguan pipa atau fasilitas minyak lain, dan sejenisnya. Segala bentuk risiko dan ancaman yang terkait dengan energi merupakan ancaman bagi situasi keamanan nasional seperti ditegaskan oleh Joseph J. Romm (1993:37-38) berikut ini:

[N]o single issue demonstrates the interconnectedness of the new security discussions better than energy. Energy security [has been] like many of the other elements of an expanded definition national security ... new national security threats are interconnected – the idea of national security is expanded to include energy security...

Karena itu, bagi negara industri seperti Cina dan Jepang yang sangat bergantung pada minyak dan gas alam dari luar negeri, keamanan energi terkait erat dengan keamanan nasional masing-masing. Keduanya berstatus sebagai negara konsumen energi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan berlokasi jauh dari produsen-prosen minyak dunia, terutama dari kawasan Timur Tengah. Untuk itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan bagaimana faktor keamanan energi ini mempengaruhi hubungan Cina-Jepang sejak dekade 1970-an hingga beberapa dekade belakangan ini.

Periode Interdependensi Energi Cina-Jepang

Periode 1970-an dan 1980-an merupakan masa-masa keemasan hubungan energi kedua negara sebagai hasil kerja sama energi yang kukuh. Xuanli Liao (2008) menyimpulkan bahwa kerja sama energi telah menjadi komponen penting yang membentuk hubungan bilateral yang baik dan bersifat *mutual interdependence* antara Cina dan Jepang ketika itu. Namun, masa-masa keemasan energi tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor non-energi yang menghasilkan situasi kondusif

sehingga memungkinkan hubungan energi itu terjadi. Situasi energi yang dimaksud adalah perkembangan energi domestik Cina sendiri yang masih sangat mendukung, yaitu tersedianya sumber-sumber energi yang berlimpah dari alamnya sendiri sehingga memungkinkan Cina untuk melakukan impor energi. Dari sini penulis berargumen dua hal. Pertama, kekayaan energi ini telah memberi Cina posisi tawar yang tinggi dalam interaksinya dengan Jepang karena perbedaan status energi yang sangat besar sehingga Jepang berkepentingan terhadap cadangan-cadangan minyak Cina. Kedua, interaksi energi Cina-Jepang itu juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung lainnya yang berdimensi non-energi, yaitu pertumbuhan ekonomi, politik, dan kondisi strategis era Perang Dingin yang akan diuraikan berikut ini.

Faktor Domestik Cina: Cadangan Energi yang Berlimpah

Sebelum tahun 1972, Cina dan Jepang memiliki hubungan politik yang bersifat *strategic confrontation*, sehingga Cina juga belum memiliki ikatan energi kuat dengan Jepang. Namun pasca tahun tersebut hingga dekade 1980-an, hubungan mereka bersifat *strategic embracement* (Chen Zhimin and Zang Zhijun, 2004:1). Perubahan ini terjadi setelah kebekuan politik kedua negara mulai cair sebagai hasil negosiasi aktor-aktor politik informal dua negara yang bertindak sebagai pihak ketiga dalam normalisasi diplomatik mereka (Quansheng Zhao 2008). Sejak itu, saluran-saluran ekonomi-politik mulai terbuka, termasuk dalam hal kerja sama energi. Beberapa pengamat menyatakan bahwa dekade 1970-an hingga dekade 1980-an adalah masa-masa terbaik dalam hubungan kerja sama antara Cina dan Jepang sehingga menjadi faktor pengikat yang telah berhasil memberi kesan positif terhadap hubungan bilateral kedua negara

(Xuanli Liao 2008, Zha Daojiong 2010, (Chen Zhimin and Zang Zhijun 2004). Sepanjang dua dekade ini pula hubungan energi antara Cina dan Jepang juga mulai terjalin, dimulai ketika Cina mengeksport minyak ke Jepang di tahun 1973. Ekspor minyak tersebut jumlahnya meningkat semakin banyak di tahun 1975 dan terus meningkat tinggi dalam tahun-tahun berikutnya.

Secara historis, Cina telah sangat mandiri dalam hal energi karena merupakan negara yang dikaruniai kekayaan sumber daya alam, terutama cadangan sumber-sumber bahan bakar yang berlimpah. Bahkan sejak dekade 1950-an dan 1960-an, Cina sudah berhasil mencapai tahap *energy self-sufficient* (Zha Daojiong, 2010:2, Xuanli Liao 2008) – suatu kemampuan untuk memenuhi konsumsi energinya sendiri yang diwarisi sejak masa Mao Zedong. Bahkan pada pertengahan dekade 1960-an, Cina telah menjadi negara produsen minyak terbesar di Asia (Mikkal E. Herberg 2004:348). Itulah mengapa dalam beberapa dekade tersebut, isu keamanan energi belum menjadi prioritas atau belum mendapat perhatian serius dalam kebijakan-kebijakan pemerintah atau masyarakat Cina pada umumnya sebab mereka memiliki persepsi bahwa cadangan energi masih dalam kondisi yang cukup “aman.”¹

Hasilnya, Cina mampu memenuhi kebutuhan energi yang tinggi dengan hanya mengandalkan produksi energi domestiknya, sehingga dampaknya terhadap pasar energi global ketika itu juga masih minimal menurut laporan *World Energy Outlook 2007* (IEA 2007:262). Kemandirian energi bahkan membuat Cina sempat

mendapat julukan “*New Saudi Arabia*” (Vaclay Smil 2007:5) karena banyaknya ladang-ladang minyak yang dimiliki, terutama ladang minyak di wilayah Daqing.

Faktor Ekonomi: Hubungan Mutual Dependence

Kekayaan energi Cina membuatnya menjadi negara pengeksport dan pemasok minyak mentah yang utama bagi Jepang. Meski demikian, dari segi pembangunan ekonomi Cina masih tergolong negara miskin. Sebaliknya, Jepang ketika itu sudah lebih dulu muncul sebagai satu-satunya negara industri maju di Asia dan menjadi pesaing ekonomi Barat. Namun di sisi lain, Jepang adalah negara yang miskin sumber daya alam, terutama bahan bakar seperti minyak, gas dan batu bara. Oleh karena itu, kedua negara ini merasa saling memerlukan dan saling bergantung satu sama lain. Jepang bergantung pada suplai minyak dari Cina, sedangkan Cina memerlukan bantuan teknologi dan ekonomi dari Jepang untuk memperbesar tingkat pembangunan ekonomi yang masih sangat terbelakang dibandingkan kemajuan Jepang ketika itu (Haidar Khan 2007:13).

Yang diberikan Jepang untuk membantu pembangunan Cina cukup besar. Salah satunya adalah ODA (*Official Development Assistance*) Jepang ke Cina yang dimulai tahun 1979. Hingga saat ini sekitar 3,1331 trilyun yen (dalam bentuk bantuan pinjaman), 145,7 milyar yen (bantuan hibah) dan 144,6 milyar yen (kerja sama teknis) telah dilaksanakan. Proyek-proyek ODA di Cina termasuk proyek-proyek skala besar membangun infrastruktur ekonomi, seperti pembangunan jalan raya, bandara dan stasiun listrik, serta proyek-proyek infrastruktur di bidang medis dan lingkungan hidup. Proyek-proyek ini telah memainkan peran penting dalam realisasi pertumbuhan ekonomi Cina yang ada saat ini (Haidar Khan 2007:13).

¹ Perhatian dari para pengamat atau penelitian para akademisi Cina juga masih sangat kurang sehingga literatur, data maupun dokumen mengenai isu keamanan ini kurang tersedia dalam periode-periode tersebut.

Dengan kata lain, hasil kerja sama kedua negara telah membuat kesenjangan dalam tahap pembangunan ekonomi mereka menyempit. Jepang tidak melihat Cina sebagai pesaing, justru ekspor minyak Cina telah banyak membantu Jepang untuk memperluas sumber persediaan energinya. Selain itu, kerja sama itu juga memudahkan Jepang memperluas akses produksinya ke pasar Cina yang besar karena penduduknya yang sangat padat. Sebaliknya, ekspor minyak telah membuat Cina mendapatkan transfer teknologi canggih dari Jepang sehingga memudahkan program modernisasi industrinya pada tahun 1970-an. Bisa disimpulkan bahwa dekade tersebut merupakan fase saling kebergantungan (*mutual dependence*) ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Faktor Politik: Mutual Trust

Secara politik pula, dekade tahun 1970-an juga adalah periode normalisasi hubungan politik dan diplomatik antara Cina dan Jepang. Normalisasi diplomatik ini berasal dari dua peristiwa bersejarah yang berlangsung dalam dekade tersebut:

1. Pada tanggal 29 September 1972, Cina dan Jepang menyepakati perjanjian komunike bersama antarpemerintah (*Joint Communique of the Government of Japan and the Government of the People's Republic of China*).
2. Pada tanggal 12 Agustus 1978, Cina dan Jepang menandatangani perjanjian pembinaan keamanan dan persahabatan antara mereka (*Treaty of Peace and Friendship between Japan and the People's Republic of China*)

Perjanjian yang pertama dikenal juga dengan peristiwa "*Tanaka goes to Beijing*": Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka mengunjungi Beijing untuk memformalkan pemulihan hubungan diplomatik antara kedua negara. Dalam dokumen Kementerian Luar Negeri Jepang disebutkan

bahwa dalam pertemuan tingkat tinggi dengan Perdana Menteri Chou En-lai Tanaka mulai mengajukan proposal untuk pengembangan bersama sumber daya (*joint resources development*) di sekitar Pulau Senkaku yang kaya akan cadangan minyak dan gas (Artikel dalam <http://ajw.asahi.com>). Meskipun isu ini bukan masalah utama dalam pertemuan tersebut, namun perjanjian pertama telah membuka dialog-dialog kedua negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Usaha untuk saling mendekati berlanjut dengan perjanjian persahabatan tahun 1978. Cina dan Jepang menegaskan pernyataan bersama bahwa kedua negara akan berusaha memperkuat serta mengembangkan hubungan damai dan bersahabat yang dimotivasi oleh semangat bertetangga yang baik (*good neighbourliness*) dan persahabatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip saling menguntungkan (Ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Sunao Sonoda dan Menteri Luar Negeri Cina Huang Hua. Artikel dalam <http://www.taiwan documents.org/beijing.htm>).

Hasil kedua perjanjian tersebut menjadi momentum penting dan bersejarah yang menandai normalisasi hubungan diplomatik Cina-Jepang dan menjadi titik tolak bagi mereka untuk meningkatkan rasa saling percaya dan mendorong pembinaan kembali kerja sama bilateral. Jepang juga memberi bantuan ekonomi kepada Cina sebagai bentuk pembayaran kerugian perang menyusul tindakan "*doing wrong*" Jepang semasa Perang Dunia II. Kepercayaan politik yang terjalin antara pemimpin Cina dan Jepang juga mendorong munculnya "*generational friendship*" (*shidai youhao*). Contohnya adalah ketika elit-elit politik dan birokrasi Jepang secara formal menyatakan siap menerapkan kebijakan "*open the door to China*" dan siap untuk bekerjasama dengan Cina, terutama dalam

hal eksplorasi minyak Cina yang belum tersentuh. Jepang kemudian berpartisipasi dalam pembangunan ladang-ladang minyak bawah laut di sekitar perairan Bohai (Quansheng Zhao 2008:94). Tingginya intensitas kerja sama antara kedua pihak dan ketertarikan Jepang berinvestasi dalam bisnis-bisnis lainnya dikenal dengan istilah "China fever" dan mencapai puncaknya dalam dekade 1970-an tersebut.

Faktor Strategis: Mutual Interest

Faktor ketiga adalah adanya kepentingan strategis bersama (*mutual interest*). Secara strategik, kedua negara tersebut sama-sama memiliki sengketa teritorial dengan Uni Soviet yang ketika itu merupakan satu kekuatan dunia dalam konteks Perang Dingin. Konflik perbatasan Sino-Soviet atas Pulau Zhenbao di Sungai Ussuri, yang disebut oleh Russia sebagai Pulau Damanskii, pernah mencapai puncaknya dalam bentrokan di perbatasan pada bulan Maret 1969. Jepang dan Uni Soviet juga memiliki sengketa perbatasan atas Pulau Kuril yang menurut Uni Soviet merupakan bagian dari wilayah Sakhalin Oblast, tetapi juga diklaim Jepang. Konflik ini juga dikenal dengan *the Northern Territories dispute*.

Secara tradisional, sengketa perbatasan dengan satu negara yang sama menimbulkan persepsi ancaman yang serupa baik bagi Cina maupun Jepang. Dapat dipahami bila secara bilateral Cina dan Jepang saling memberi dukungan politik atas pengembalian wilayah perbatasan yang dipersengketakan dengan Uni Soviet. Kesamaan kepentingan politik ini mendorong rasa saling percaya Cina-Jepang dan mempengaruhi pertimbangan strategis mereka dalam perkembangan Perang Dingin, yaitu antara mendukung Uni Soviet maupun Amerika Serikat. Kesamaan sengketa tersebut kemudian membentuk dasar kepentingan politik dan

menilai kembali politik luar negeri mereka terhadap Amerika Serikat untuk mendapatkan dukungan dalam menentang Uni Soviet.

Singkatnya, kedekatan dan kesamaan kepentingan ekonomi-politik serta pertimbangan strategis Cina-Jepang dalam kurun waktu Perang Dingin menjadi faktor pendukung yang memungkinkan terjadinya interdependensi energi kedua negara. Faktor utamanya adalah tidak adanya persaingan energi antara Cina-Jepang karena status energi mereka yang sangat berbeda, di mana Cina adalah negara pengekspor minyak utama dan Jepang adalah negara pengimpor terbesarnya. Secara keseluruhan, perkembangan positif tersebut membentuk corak kerja sama energi yang memperkuat hubungan bilateral Cina-Jepang, yang disifatkan oleh Chen Zhimin dan Zang Zhijun (2004:5) sebagai suatu "*strategic embracement*", yaitu saling mendekati dan merangkul yang disesuaikan dengan dasar dan kepentingan-kepentingan strategis kedua negara.

Perspektif Jepang dan Status Keamanan Energinya

Sementara itu, bagi Jepang problem kekurangan energi sebenarnya bukanlah isu yang baru. Hal ini berasal dari kondisi alam Jepang yang memang sangat miskin akan sumber-sumber energi, padahal negara itu sangat memerlukan pasokan bahan bakar dalam jumlah besar untuk menjalankan roda industri dan pembangunan ekonominya. Ken Koyama (1997) mencatat bahwa Jepang tidak mempunyai satu pun ladang minyak utama sehingga ia sangat bergantung pada pasokan dari luar untuk memenuhi hampir keseluruhan kebutuhan minyaknya.

Ketergantungan Jepang terhadap energi meningkat empat kali lipat saat krisis minyak terjadi di tahun 1973 dan meningkat dua kali lipat pada tahun 1979. Semua ini

telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi industri Jepang. Akibatnya, pada 1980-an Jepang menjadi *net importer* sebesar 90% dari keseluruhan kebutuhan energinya. Setelah itu, Jepang berusaha mengurangi konsumsi minyaknya dengan cara mengembangkan segala macam sumber energi, dari energi matahari, energi dari gelombang panas, dan lainnya. Namun, tetap saja pada dekade 1990-an, Jepang masih harus mengimpor sekitar 85% keperluan energinya (Purnendra Jain 2007:30). Untuk energi bahan bakar fosil Jepang memerlukan sekitar 100% minyak, sementara sekitar 96% gas alam Jepang berasal dari impor. Swasembada energi Jepang hanya 18% dewasa ini, atau 4% saja jika energi nuklirnya dikecualikan (Shoichi Itoh 2008:82).

Dapat dipahami bila Jepang menjadi khawatir ketika terjadi perubahan status energi Cina dari negara eksportir menjadi negara importir minyak mentah di tahun 1993. Perubahan ini terjadi karena meningkatnya penggunaan energi Cina akibat *booming* pembangunan ekonomi dan pertumbuhan industrinya yang pesat. Konsumsi energi Cina meningkat drastis dalam sektor industri, pertanian, militer, transportasi umum, keperluan kantor, maupun untuk masyarakat dan kebutuhan rumah tangga. Dampaknya, permintaan tenaga oleh pemerintah, industri dan masyarakat luas terus meningkat secara drastis dari tahun ke tahun sehingga mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Banyak pengamat energi Cina bersepakat bahwa faktor-faktor tersebut adalah penyebab perubahan status energi Cina, ditambah lagi dengan kerusakan alam sekitar sehingga banyak ladang-ladang minyak Cina terhenti produksinya (David Zweig dan Bi Jianhai 2005, B. Kong 2005, Zha Daojiong 2006, Susan Craig 2007). Dengan kata lain, rakyat dan pemerintah Cina dianggap gagal mengontrol

penggunaan energinya sehingga berdampak buruk secara internal dan berimplikasi pada perilaku eksternalnya.

Kondisi di atas berarti bahwa kedua negara ini bersaing dalam mengkonsumsi energi, khususnya minyak dan gas alam. Cina kemudian telah semakin agresif menjamin keamanan energinya dengan melakukan perburuan energi hingga ke luar negeri di banyak tempat di dunia. Belum lagi hubungan kedua negara sepanjang kurun 1990-an juga kerap terganggu oleh berbagai faktor-faktor di luar masalah energi, terutama faktor politik-militer. Sebagaimana dikemukakan oleh Punendra Jain (2007:28), peningkatan persaingan energi dari Cina (dan India) adalah salah satu kompleksitas baru yang harus dihadapi oleh Jepang di masa kini dan masa mendatang.

Perubahan Status Keamanan Energi Cina

Memasuki dekade 1990-an, hubungan energi Cina-Jepang telah mengalami penurunan, bahkan kemunduran yang dramatis. Hubungan damai dalam dua dekade sebelumnya tidak berlangsung lama karena sejak awal dekade 1990-an interaksi kedua negara itu memasuki babak baru yang berpotensi menimbulkan konfrontasi karena faktor keamanan energi meskipun Perang Dingin telah berakhir di akhir tahun 1989. Keadaan ini dapat ditelusuri dari perubahan situasi energi domestik Cina sendiri berupa berakhirnya era kemandirian energi sehingga kerja sama energi mereka lambat laun menjadi lemah.

Berakhirnya Era Energy Self-sufficient Cina

Lemahnya ikatan kerja sama energi kedua negara adalah dampak langsung dari situasi Cina yang telah berubah menjadi negara yang mulai khawatir akan keamanan energinya sendiri. Prediksi beberapa pakar bahwa Cina adalah "*New Saudi Arabia*" hanya terbukti sebentar saja.

Anggapan itu telah berakhir setelah Cina mulai menghadapi penurunan kapabilitas untuk mencukupi keperluan energi domestiknya sendiri (Vaclay Smil 2007:5). Situasi ini membuktikan bahwa selama ini Cina tidak pernah benar-benar mengalami situasi keamanan energi. Dengan kata lain, meskipun beberapa dekade sebelumnya Cina telah mengalami *energy self-sufficient* (kecukupan energi), namun bukan berarti energi Cina juga telah aman. Menurut Zha Daojiong (2010:2):

[E]nergy self-sufficiency is not the same thing as energy security. A country has meaningful energy security when its management of energy supply and demand serves the purpose of developing of its economy and society. This was not the case in China

...

Kemerosotan produksi energi Cina yang drastis semakin membuat banyak pihak sangsi terhadap keamanan energi Cina. Contohnya Vaclay Smil (2007:19), yang menyatakan bahwa harapan besar tentang prediksi "*New Saudi Arabia*" itu selama ini terlalu dibesar-besarkan saja dan kini terbukti mengecewakan setelah melihat adanya kontradiksi antara kebutuhan energi negara dengan turunnya produksi minyak mentah dan gas alam Cina. Juga seperti ditegaskan oleh Zha Daojiong (2006): "*the era of Chinese energy independence is gone, along with the ideology of self-reliance as a viable guide for energy policymaking.*" Karena itulah, kebijakan-kebijakan Cina selanjutnya sangat dipengaruhi oleh kondisi energinya yang diwarnai oleh ketergantungan besar terhadap bahan bakar untuk proses industri.

Ketergantungan Minyak Cina

Pendapat Smill dan Zha Daojiong di atas terbukti sejak awal tahun 1990-an ketika produksi minyak Cina mulai merosot sehingga terjadi kesenjangan antara permintaan dan persediaan serta konsumsi dan produksi energi. Cina tidak dapat

memenuhi permintaan energi domestiknya sendiri sehingga mulai melakukan impor minyak sejak tahun 1993 dan terus meningkat cepat di tahun-tahun selanjutnya, yang awalnya sekitar 1% di tahun 1993 meningkat menjadi 48% di tahun 2004 (B. Kong 2008:9).

Kebergantungan terhadap minyak adalah hal yang paling serius di antara keseluruhan situasi sumber energi Cina yang lain, sebagaimana ditunjukkan oleh Joseph S.Y.Cheng (2008:304). Menurut Cheng, impor minyak Cina diperkirakan akan meningkat sekitar 32,34% menjadi 37,02% dari jumlah penggunaan pada tahun 2010 menurut enam skenario berbeda yang dibuat oleh para akademisi Cina. Angka ini diprediksi akan meningkat menjadi sekitar 57,55% hingga 68,36% dari jumlah keseluruhan penggunaan pada tahun 2020. Laporan dari IEA (dalam Pollack 2008:232) juga menunjukkan data yang serupa, yaitu bahwa permintaan minyak Cina diperkirakan akan melonjak 50% di tahun 2030. Kebutuhan minyak Cina kini kebanyakan diimpor dari Afrika (26%), Timur Tengah (17%), dan Rusia (8%), sementara dari Asia Tengah diproyeksi akan meningkat hingga 15%.

Cina kemudian menyadari bahwa ia mempunyai ketergantungan pada minyak dan akhirnya berubah dari eksportir minyak sejak tahun 1960-an menjadi importir minyak sejak tahun 1993. Situasi energi domestik Cina selanjutnya semakin buruk, sebab di tahun 2003 China telah melampaui Jepang sebagai konsumen minyak terbesar kedua di dunia di belakang Amerika Serikat dan menjadi lima besar importir minyak (Mikkal E.Herberg 2004:348). Peningkatan ketergantungan energi terhadap impor minyak merupakan petunjuk utama berkurangnya keamanan energi Cina (Susan Craig 2007:131) dan menambah krusial hubungan bilateralnya dengan negara tetangganya, Jepang.

Implikasi Perubahan Status Energi Cina terhadap Potensi Konflik dan Kerjasama Energi Cina-Jepang

Perubahan drastis dalam keamanan energi Cina telah menimbulkan implikasi serius dan signifikan terhadap hubungan negara itu dengan Jepang. Banyak pengamat bertanya-tanya apakah implikasi tersebut lebih bersifat positif atau negatif terhadap hubungan bilateral kedua negara dalam dua dekade belakangan ini; apakah akan mengarah pada kerja sama atau konflik/perang. Banyak analisis yang menyinggung isu ini dan mengajukan pertanyaan serupa (Yinan He 2008; Suisheng Zhao 2009; Jie Chen 2004; Susan Craig 2007; Soichi Itoh 2005; Haider A.Khan 2007; Victor Yuan 2004, Soichi Itoh 2008, Haider A. Khan 2007, Zha Daojiong 2010; Ma Xiao 2005; E.A. Wishnick 2007, dan Md Nasruddin Md.Akhir 2000).

Pada dasarnya, artikel ini merumuskan bahwa kedua kecenderungan itu muncul dan berlangsung berbarengan. Dengan kata lain, perkembangan hubungan keamanan energi Cina-Jepang dapat disifatkan sebagai pola kerja sama dan konflik yang terjadi berdampingan (*co-exist*) sehingga menciptakan "*hot-cold relations*" dalam hubungan kedua negara secara umum. Hubungan yang baik-turun tersebut sebenarnya bukan hal baru, namun dengan munculnya berbagai masalah dalam isu keamanan energi membuat hubungan bilateral Cina-Jepang yang sebelumnya sering "naik-turun" menjadi lebih kompleks dan rumit dibanding dekade sebelum 1990-an. Dengan kata lain, munculnya persepsi ancaman dalam hal keamanan energi membuat kedua negara lebih mewaspada satu sama lain, saling curiga, dan terlibat dalam berbagai ketegangan lainnya.

Salah satu kontradiksi ini jelas terlihat dalam hasil kajian Victor Yuan (2004). Disebutkan bahwa bantuan dan partisipasi Jepang dalam krisis energi Cina sebenarnya

cukup besar, seperti transfer teknologi Jepang untuk membantu Cina menanggulangi masalah-masalah eksplorasi ladang-ladang minyak dan gasnya, pelatihan dan pendidikan di sektor energi, teknologi daur ulang energi serta penanggulangan dampak energi terhadap lingkungan hidup. Namun, tetap saja kerja sama energi antara kedua negara itu dingin. Jepang memang aktif memberi bantuan teknis, namun ia juga cemas dan merasa terancam atas usaha-usaha Cina mengamankan kebutuhannya. Indikasi lain dikatakan oleh Haider A.Khan (2007:11): "*The most recent moves, on the surface at least, seem to signal increased willingness to cooperate on the part of both the countries in some crucial areas of mutual concern...*" Singkatnya, walaupun hubungan energi Cina dan Jepang sejak awal dekade 1990-an cenderung kontras dan antagonis, namun jalinan kerja sama mereka juga tetap terjalin. Bagian tulisan berikut ini mengeksplorasi terlebih dahulu situasi yang berpotensi menjadi sumber konflik energi antara Cina-Jepang.

Potensi Konflik Keamanan Energi Cina-Jepang

Kecenderungan pertama yang muncul adalah adanya potensi konflik energi Cina-Jepang akibat berkurangnya keamanan energi Cina sehingga mendorong pemerintah Cina mencari dan berusaha menjamin keamanan sumber-sumber energinya. Hal ini penting karena jika persediaan energi terhenti, maka pertumbuhan ekonomi negara itu juga akan terganggu, pabrik-pabrik dan sektor industri lainnya akan terhambat atau bisa terhenti produksinya sama sekali. Jika skenario ini terjadi, akan terjadi pengangguran besar-besaran hingga pada akhirnya menimbulkan gejala-gejala sosial lainnya di negara yang berpenduduk terbanyak di dunia tersebut. Implikasi lainnya adalah bahwa hal

tersebut akan mempengaruhi masalah politik-pemerintahan negara sehingga mendorong pemerintah semakin aktif mencari energi meskipun di kawasan-kawasan yang rentan konflik. Dihadapkan pada berbagai risiko tersebut, Cina menunjukkan perilaku yang agresif untuk menjamin kestabilan serta kelancaran persediaan dan akses energinya hingga menyebabkan gesekan kuat dengan saingan energi terbesarnya di kawasan, yaitu Jepang. Dua kasus utama akan diutarakan di sini, yaitu sengketa Cina dengan Jepang mengenai sumber daya maritim di Laut Cina Timur dan akses jalur energi dari Siberia Timur (Rusia).

Ketegangan di Laut Cina Timur: Sea of Confrontation?

Ketertarikan Cina terhadap minyak telah mendorong negara tersebut mencari minyak ke semua tempat, termasuk di Laut Cina Timur yang sama-sama diklaim kepemilikannya oleh Cina dan Jepang. Kedua negara berselisih tentang kepemilikan Kepulauan Senkaku (disebut Diaoyu/Diaoyudao oleh Cina atau Diaoyutai oleh Taiwan). Wilayah maritim ini diyakini memiliki cadangan minyak dan gas alam yang besar. Sean Curtin (2005) mencatat bahwa apa yang terdapat di Laut Cina Timur adalah cadangan/kandungan gas alam sebanyak 200 juta meter kubik.

Perebutan sumber-sumber minyak dan gas memperparah lagi sengketa perbatasan yang sudah ada sebelumnya antara Cina dengan Jepang. Kapal-kapal pencari ikan dan Angkatan Laut Cina kerap memasuki wilayah tersebut serta melakukan aktivitas pengeboran dan eksplorasi minyak. Sikap agresif yang ditunjukkan Cina itu menimbulkan ketegangan dan kemarahan di pihak Jepang. Media massa Jepang – misalnya harian *Yaori Shimbun* yang konservatif – sering mengistilahkan wilayah maritim Laut Cina Timur sebagai “*sea of con-*

frontation” atau “*sea of conflict*.” Bahkan karena ledakan peningkatan konsumsi energi Cina, banyak ahli studi kawasan di Jepang menjuluki Cina sebagai “*the resource-gorging country*.”

Selain itu, tingginya eskalasi dan persaingan sengit kedua negara juga diwarnai dengan sentimen nasionalisme, baik rasa anti-Jepang maupun sebaliknya, sehingga menimbulkan banyak prediksi bahwa sengketa energi di Laut Cina Timur memungkinkan terjadinya konflik baru antara Cina dan Jepang. Digambarkan oleh Dan Denning (2005):

Japan and China have escalated tensions over drilling in the East China Sea. Last week, Japan began allocating rights for gas exploration in a disputed area of the East China Sea to private firms. China certainly needs the oil and energy. But it may also be worried that in a conflict with Japan (or Taiwan), its energy supply could easily be choked off... may simply escalate conflicts with China with regard to energy security, due to the lack of policy coordination between the two.

Dampak tindakan Cina terhadap Jepang dalam konteks ini juga telah diprediksi oleh dua skenario dalam laporan *The Center for Safety and Security Research (CSSR)*, sebuah lembaga penelitian di bawah Departemen Pendidikan, Sains dan Teknologi Jepang (*Yomiuri Shimbun*, 2005). Skenario pertama, pertempuran atas sumber energi. Skenario ini mengasumsikan bahwa jika Cina memperkuat pengadaan energinya tanpa mempertimbangkan faktor *cost-efficiency*, maka dunia akan masuk dalam situasi di mana setiap negara bersaing untuk memperoleh minyak dengan mengabaikan mekanisme pasar internasional. Akibatnya adalah ketegangan politik antara kedua negara atas sumber daya di Laut Cina Timur akan memuncak. Skenario kedua mengasumsikan isolasi terhadap Jepang. Jika Cina berhasil menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara Asia Tenggara, maka ketertarikan mereka pada Cina

akan meningkat sekaligus mengarah pada isolasi Jepang.

Kedua skenario menggambarkan prediksi mengejutkan bagi Jepang. Kekhawatiran Jepang juga diutarakan oleh Horii Hideyuki dari Universitas Tokyo, yang mengatakan bahwa Jepang harus bekerja untuk mengambil tindakan nyata jika terjadi *worst-case situations* berdasarkan model kedua skenario tersebut. Menurutnya, tidak ada jaminan bahwa salah satu skenario terburuk itu tidak akan terwujud jika Jepang hanya duduk berpangku tangan. Menurut Soichi Itoh (2005), meskipun sengketa Sino-Jepang mengenai eksplorasi gas alam dan pembangunan di

Laut Cina Timur hampir tidak pernah berubah, ia juga skeptis jika penyelesaian konflik Sino-Jepang atas pengembangan Laut Cina Timur dapat diselesaikan dengan perang.

Persaingan Akses Energi dari Siberia Timur

Kasus ketegangan lainnya adalah persaingan Cina dan Jepang untuk mengamankan akses dan pembangunan proyek konstruksi jalur pipa minyak dan gas dari Siberia Timur, yang dinamakan ESPO (*East Siberia-Pacific Ocean*). Isu ini juga semakin memperburuk rasa saling curiga dan ketegangan hubungan antara Cina-Jepang. Rusia memprioritaskan pembangunan jalur pipa dari Skovorodino (dekat perbatasan dengan Cina) hingga mencapai wilayah Daqing di Cina. Cina juga aktif melakukan *lobby* kepada Rusia untuk membangun pipa dengan rute tersebut agar Cina dapat mengontrol keamanan jalur pipa minyak dan gas yang melewatinya. Perkembangan ini menimbulkan keprihatinan Tokyo, yang khawatir jika pasokan minyak dari ladang minyak di Siberia Timur mungkin hanya dialirkan sampai ke Cina saja.

Oleh karena itu, Jepang telah mendesak Rusia untuk menjamin agar jalur pipa tersebut diperluas hingga ke sebuah teluk dekat Nakhodka di pantai Pasifik Rusia, di luar rencana pembangunan Rusia sebelumnya. Kasus ini mendapatkan banyak perhatian dunia, khususnya media massa global, sejak kunjungan Perdana Menteri Junichiro Koizumi ke Moskow pada bulan Januari 2003. Ketika itu Jepang secara resmi mengungkapkan kepentingannya dalam rencana Rusia membangun jalur pipa minyak mentah dari Siberia Timur ke Samudra Pasifik yang lebih dekat dengan wilayah teritori Jepang. Hasilnya, di bulan November 2005 Perdana Menteri Koizumi dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui perjanjian di Tokyo² yang berisi kesediaan Rusia untuk mengeksport “sejumlah tertentu minyak” ke Jepang dan negara-negara lainnya dari pantai Pasifik mulai tahun 2008. Jepang ingin lebih diprioritaskan untuk memperoleh akses saluran pipa Siberia, demikian pula dengan Cina. Sengitnya pertentangan kepentingan kedua negara tersebut dalam isu ini membuat kasus ini disebut “*Sino-Japanese scramble*.”

Dari dua kasus tersebut di atas, banyak pihak yang mengkhawatirkan Cina dan Jepang akan terlibat dalam konflik terbuka untuk mempertahankan kepentingan dan keamanan energi masing-masing. Namun, sebenarnya juga terdapat saluran kerja sama energi yang cukup besar sebagaimana dijelaskan di bawah ini, meski belum maksimal karena faktor persaingan akses energi di atas.

² Persetujuan dalam proyek kerja sama energi bilateral merupakan salah satu dari 12 dokumen yang disetujui oleh kedua pemimpin. Ini menandai kali pertama Tokyo dan Moskow menetapkan rincian tentang rencana pembangunan pipa sepanjang 4.188 kilometer ke Perevoznaya dekat Nakhodka. Lihat www.migasindonesia.com, 18 April 2009.

Jalur Kerja Sama Energi Cina-Jepang

Meskipun potensi konflik energi Cina-Jepang cukup besar dan sering menimbulkan ketegangan, namun kedua negara juga membuka diri untuk bekerja sama. Penulis berargumen bahwa area kerja sama energi mereka lebih ditekankan pada isu-isu non-tradisional energi yang berdimensi sosial dan lingkungan hidup. Misalnya, bagaimana menanggulangi dan mencegah kerusakan lingkungan hidup akibat eksplorasi sumber daya energi yang berlebihan, penanggulangan pencemaran udara akibat bahan bakar minyak, gas, dan batu bara di Cina; mendidik masyarakat menggunakan energi secara hemat dan tepat guna; pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan; dan sebagainya. Kedua, Cina sekarang lebih aktif menunjukkan niatnya untuk terlibat aktif dalam kerja sama energi dengan rival energinya, Jepang, maupun secara regional.³ Cina menyadari bahwa perilaku agresifnya mencari energi berpotensi menimbulkan konfrontasi dengan Jepang hingga ia berupaya mengimbangi perilaku tersebut dengan menciptakan citra positif dan menghindari konflik energi di kawasan-kawasan yang dipersengketakan dengan Jepang.

³ Perkembangan ini bisa juga dilihat sebagai usaha Cina menurunkan persepsi ancaman atau teori 'ancaman dari Cina' setelah ia melampaui Jepang sebagai konsumen energi terbesar kedua di dunia, dan terbesar di Asia Pasifik, sebagai hasil dari kemajuan industri dan pembangunan ekonominya yang meningkat tajam. Secara konseptual, pemerintah Cina membangun paradigma baru dalam hubungan internasionalnya, yaitu bertekad meninggalkan 'mental Perang Dingin' yang bersifat konfrontatif dan konflikual dengan para pesaingnya dan menggantinya dengan politik luar negeri yang harmonis dan mengedepankan kerja sama untuk mencapai kepentingan bersama (baca Wang Yong, 2008. *East Asia Community and Nontraditional Security: A Proposal from China*. Paper yang dipresentasikan dalam konferensi "The confidence building and peace building in Asia", Waseda University, Tokyo, Jepang, 23-25 September 2005).

Dalam banyak hal, Cina telah mencontoh keberhasilan strategi Jepang menanggulangi masalah keamanan energi. Jepang juga aktif melakukan transfer teknologi untuk membantu Cina menyelesaikan masalah-masalah energinya, namun terbatas pada dimensi tersebut. Intinya, kedua negara menggalakkan kerja sama energi sepanjang tidak memiliki efek atau bersinggungan langsung dengan dimensi politik-strategis yang bersifat tradisional sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Transfer Teknologi Energi Jepang kepada Cina

Kecenderungan kerja sama dalam hubungan ambivalen kedua negara memperlihatkan bantuan Jepang yang tinggi dalam segi teknologi konservasi lingkungan dan pembangunan infrastruktur energi Cina serta aspek-aspek teknis lainnya, yang meliputi sekitar 48,7% dari keseluruhan kerja samanya dengan Cina. Kekuatan Jepang memang dalam aspek ini mengingat selama ini ia terkenal dengan teknologi yang paling maju di dalam bidang konservasi energi. Dalam hal ini Soichi Itoh (2008:12) menyatakan bahwa Jepang memiliki pertahanan tingkat tinggi untuk melindungi pasokan minyak globalnya dari berbagai potensi gangguan. Jika dibandingkan dengan bantuan Jepang untuk mengamankan energi Cina dalam aspek transportasi dan distribusi minyak dan gas alam, masih tergolong rendah yaitu 15,6%, demikian pula dalam segi implementasi kebijakan energi yang hanya 7,3% saja. Angka-angka ini cukup rendah jika dibandingkan dengan bantuan dari dan kerja sama dengan negara-negara lainnya di luar kawasan Asia Timur, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa (Victor Yuan 2004:14).

Selain itu, Jepang juga telah berhasil membangun sistem sosial-ekonomi yang

hemat energi secara keseluruhan. Hasilnya, ketergantungan Jepang pada minyak sebagai sumber energi primer telah turun dari sebanyak 77% pada tahun 1973 menjadi 50% pada tahun 2003. Jadi, meskipun terkenal sebagai “*energy-hungry country*” dengan tingkat kemandirian yang sangat rendah (*low level of self-sufficiency*), namun Jepang praktis telah membuktikan tingkat stabilitas energinya yang tinggi selama tiga dekade sejak peristiwa *Oil Shock I* di tahun 1973 karena faktor kecanggihan teknologi konservasi energinya (Shoichi Itoh 2008:82). Dalam konteks ini, terdapat beberapa area yang telah dikembangkan dalam kerja sama energi Cina dan Jepang serta telah banyak dikaji para pengamat (Haider A. Khan 2007; Victor S. Yuan 2004; Soichi Itoh 2008:83-84), dengan tiga di antaranya dijelaskan berikut ini.

Pertama, kerja sama teknologi dan konservasi lingkungan hidup. Transfer pengalaman dan teknologi sistem energi merupakan bantuan Jepang agar Cina dapat mengembangkan energi yang sehat dalam lingkungan ekonomi-sosial masyarakatnya. Contohnya seperti kebersihan udara; teknologi penyimpanan sumber energi untuk keperluan industri, perkantoran dan rumah tangga; pemrosesan gas; teknologi daur ulang energi; dan paradigma pendidikan energi (Victor Yuan 2004:14). Hasilnya adalah, menurut Soichi Itoh (2008:84), “*energy conservation has become a target of prime importance for both China and Japan ... and energy conservation is regarded as “a resource” in Chinese energy policies.*” Cina pun telah banyak belajar dari kebijakan-kebijakan Jepang yang berhasil keluar dari krisis minyak akibat peristiwa *oil shock*.

Kedua, akselerasi diversifikasi energi. Kedua pemerintah mulai mempercepat diversifikasi sumber daya energi demi mengurangi ketergantungan akan minyak. Untuk itu, pemerintah kedua negara mendorong penggunaan energi yang

diperbaharui secara lebih luas. Contohnya disebutkan dalam kajian Joseph S.Y. Chang (2008:308-313), yaitu beberapa strategi energi domestik Cina untuk hemat energi dengan mengembangkan energi murah dari sumber-sumber yang dapat diperbaharui seperti pembangkit listrik tenaga angin, tenaga surya, tenaga dari panas bumi, biomassa, hidroelektrik dan lainnya.

Ketiga, promosi untuk memanfaatkan energi yang ramah lingkungan sebagai tujuan yang sangat diperlukan Beijing dan Tokyo dan dapat dibagi bersama. Isu lingkungan hidup ini telah menjadi keprihatinan yang semakin serius, baik secara domestik pun global, karena pertumbuhan ekonomi Cina yang sangat cepat telah mengakibatkan kerusakan dan bencana lingkungan hidup. Pemerintah Cina bertujuan membangun lima babak penghematan energi dan ramah lingkungan di kalangan masyarakat dengan tujuan untuk menyediakan langkah-langkah efisiensi baik dalam penggunaan sumber daya energi maupun perlindungan lingkungan hidup.

Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa isu keamanan energi antara Cina-Jepang pernah melalui fase-fase terbaik dalam hubungan mereka, namun kemudian berubah drastis ketika status energi Cina berubah dari negara pengekspor minyak menjadi negara pengimpor. Perbedaan mendasar ini dapat dilihat dari perbandingan situasi keamanan energi Cina dalam beberapa dekade sebelum dan setelah berakhirnya Perang Dingin yang selanjutnya menimbulkan implikasi terhadap hubungan keamanan energinya dengan Jepang. Dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa hubungan energi yang harmonis antara kedua negara di dekade sebelum 1990-an telah berubah menjadi suatu hubungan yang lebih luas dan kompleks hingga kini.

Perubahan pola hubungan kerja sama energi tersebut antara lain disebabkan oleh situasi energi domestik Cina yang telah mengalami kemunduran yang drastis sehingga mendorong pemerintah aktif mengejar keamanan energi yang berakibat persaingan yang menimbulkan gesekan kuat dengan Jepang. Timbulnya kekhawatiran Jepang dan ketegangan tak terelakkan sehingga hubungan mereka sering menjadi "dingin".

Artikel ini juga menunjukkan bahwa faktor keamanan energi adalah isu penting dan memiliki kompleksitas tersendiri sebab ia dapat menghubungkan isu-isu keamanan tradisional dengan isu-isu keamanan non-tradisional seperti ekonomi, politik, dan strategis yang membentuk pola hubungan baik secara bilateral maupun dalam konteks global. Hal ini ditunjukkan oleh persaingan Cina dan Jepang dalam mengamankan impor minyak dan atau gas dari kawasan lain, yang sama-sama strategis sifatnya bagi kepentingan nasional maupun keamanan nasional mereka secara keseluruhan. Yang menarik adalah perbedaan respon Jepang atas krisis energi Cina yang menunjukkan suatu kontradiksi, yang sebenarnya cukup wajar mengingat persaingan mereka mengamankan persediaan energi masing-masing. Tanggapan Jepang tersebut berhubungan dengan usaha-usaha Cina untuk melakukan pencarian minyak secara agresif di berbagai tempat, termasuk di wilayah yang mereka persengketakan selama ini. Implikasinya adalah suatu hubungan bilateral energi yang ambivalen antara kedua negara, yang diwarnai oleh kecenderungan terjadinya konflik dan sekaligus kerja sama.

Singkatnya, kedua negara menunjukkan perilaku yang relatif serupa, yaitu terbuka untuk saling membantu dan bekerja sama dalam aspek-aspek non-tradisional yang bersifat teknis dan tidak melibatkan kepentingan strategis nasional seperti masalah sengketa wilayah atau kedaulatan

negara. Sebaliknya, ada indikasi bahwa tingkat kerja sama mereka berkurang dalam aspek-aspek yang bersentuhan langsung dengan kepentingan strategis yang sifatnya sensitif bagi hubungan bilateral mereka. Hal ini bisa dilihat juga sebagai salah satu cara kedua negara untuk mengurangi gesekan kuat dan menghindari terjadinya konflik baru atau konfrontasi dalam isu energi. Penulis mengasumsikan bahwa hubungan keamanan energi Cina-Jepang di masa-masa mendatang tetap akan menunjukkan dinamika yang menarik untuk dicermati. Sebuah kajian lain diperlukan untuk mendapatkan pemahaman atas perilaku kedua negara terkait dengan pertimbangan strategi keamanan energi baik di kawasan maupun secara global.

Daftar Pustaka

- Buzan, Barry, Waeber, O. and de Wilde, J. (1998). *Security: a new framework for analysis*. Boulder dan London: Lynne Rienner.
- Cole, Bernard D. (2008). *Sea lanes and pipeline: energy security in Asia*. London: Praeger Security International.
- Md Nasruddin Md. Akhir. (2006). *Pertahanan Jepun: Ancaman Senjata Nuklear di Asia Timur*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.
- Smil, Vaclav. (2004). *China's Past, China's Future*. New York and London: Routledge.
- Jain, Purnendra. (2007). *Japan's Energy Security in an era of Emerging Competition in the Asia Pacific*, dalam Michael Wesley (ed.) *Energy Security in Asia*, London and New York: Routledge.
- Klare, Michael T. (2008). *Energy security*, dalam Paul D. Williams (eds.), *Security*

- studies: An introduction*. New York: Routledge.
- Koyama, Ken. (1997). "Growing Energy Demand in Asian Countries", dalam Stevens, P. et al., *Gulf Energy and the World: Challenges and threats*. Abu Dhabi: The Emirates Centre for Strategic Studies and Research.
- Zhao, Quansheng. (2008). Third parties in the Beijing-Tokyo negotiations: informal political actors and mechanisms, dalam Jacob Bercovitch, Kwei-Bo Huang dan Chun-Chiang Teng (eds.), *Conflict management, security and intervention in East Asia*. London dan New York: Routledge.
- Daojiong, Zha. (2010). Oiling the Wheels of Foreign Policy? Energy Security and China's International Relations. *Asia Security Initiative Policy Series*. Working Paper no. 1, March.
- He, Yinan. (2008). Ripe for Cooperation or Rivalry? Commerce, Realpolitics, and War Memory in contemporary Sino-Japanese Relations. *Asian Security Journal*. Volume 4, Number 2. 2008.
- Herberg, Mikkal E. (2004). Asia's Energy Insecurity: Cooperation or Conflict?. *Strategic Asia 2004-05*.
- Itoh, Shoichi. (2008). China's Surging Energy Demand: Trigger for Conflict or Cooperation with Japan? *East Asia*. Vol. 25, hal. 79-98.
- Liao, Xuanli. (2006). The petroleum factor in Sino-Japanese relations: beyond energy cooperation. *International Relations of the Asia Pacific*, Vol. 7 No. 1.
- Shimbun, Yamouri. (2005). China Gorging and Japan-China Resource and Energy Conflicts. *Japan Focus June 29, 2005*.
- Normalization of relations: China claims it agreed with Japan to shelve the dispute in 1972, Japan denies*. Dalam <http://ajw.asahi.com>.
- International Energy Agency. (2007). *Energy World Outlook 2007: China and India Insight*.
- Treaty of Peace and Friendship between Japan and the People's Republic of China*. Dokumen dalam <http://www.taiwan-documents.org/beijing.htm>
- www.migasindonesia.com, 18 April 2009.
- Kong B. (2005). *An anatomy of China's energy insecurity and its strategies*. USA: Pacific Northwest National Laboratory.
- Yong, Wang. (2005). East Asia community and nontraditional security: a proposal from China. Paper yang dipresentasikan dalam konferensi "*The confidence building and peace building in Asia*", Waseda University, Tokyo, Jepang, 23-25 September 2005. (Online). (www.IRChina.org, diakses 9 Juni 2010).
- Wishnick, E. A. (2007). *Comparing China's Energy and Environmental Relations with Japan and Russia: Sources of Conflict and Cooperation*. Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association 48th Annual Convention, Hilton Chicago, Chicago.
- Chen, Jie. (2004). *Chinese perceptions of threats from the United States and Japan*. (Online). (http://www.rice.edu/energy/research/asiaenergy/docs/BIPP_UFJ_JIECHEN_063004.pdf, diakses 8 Mei 2009).
- Cornel, Phillip E. Energy security as national security: defining problems ahead of solutions. (Online). (<http://www.ensec.org>, diakses 19 Februari 2009).
- Craig, Susan L. (2007). Chinese Perceptions Of Traditional And Nontraditional Security Threats. (Online). (<http://>

- www.StrategicStudiesInstitute.army.mil/, diakses 8 Mei 2009).
- Khan, Haider A. (2007). *China's Energy Security with Special Reference to Japan*. (Online). (<http://ssrn.com>, diakses 10 April 2011).
- McCaskill, John R. (2007). *Energy security: the nexus of national security and energy policy*. (Online). (<http://www.dtic.mil>, diakses 3 Maret 2012).
- Rosner, Kevin. (2010). *Closing the gap between energy & national security policy*. *Journal of Energy Security*. (Online). (<http://www.ensec.org>, diakses 19 Februari 2009).
- Yuan, Victor. (2004). *Chinese Resident's perceptions of environment and energy*. (Online). (<http://www.horison-china.com>, diakses 12 Juni 2009).
- Xiaojun, Ma. (2005). *East Asia Energy Strategy: Conflict or Cooperation*. (Online). (<http://www.aei.org>, diakses 17 Desember 2009).
- Zhao, Suisheng. (2009). *China's Global Search for Energy Security: Cooperation and Competition in the Asia-Pacific*. (Online). (<http://japanfocus.org>).
- Zhimin, Chen dan Zang Zhijun. (2004). *Embracing or Balancing: China's Search for a Japan Strategy*. *International Review: A journal published by Shanghai Institute for International Studies*. (Online). (<http://www.irchina.org>).